

DAFTAR PUSTAKA

- Intan Annisa. 2021. *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
- Sumiati, I Suyitno, Bakhtiar. (2013). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)*. Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat, 1(1).
- Eddy Rifai. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung.
- I Remaja. (2022). *Penggunaan Pendekatan Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Riyadi, Slamet. 2015. *Jejaring Kelembagaan (Institutional Networking) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jurnal Sosek KP, 10(1).
- N Haryono. 2012. *Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik*. Jejaring Administrasi Publik, IV (1).
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- M. Jailani, Risnita, Ardiansyah. (2023). *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam
- Saenab. (2018). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar*. Disertasi. Doktor. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- N. Herman, H. Thalib, A. Qahar. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Makassar*. Meraja Journal, 3 (3).

- Nurhayati, A. Aslinda, H. Akib. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1).
- Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
- Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 656/623.05/Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kepengurusan tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2012). *Governance network theory: Past, present and future*. *Policy and Politics*, 40(4), 587–606.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2014). *Complexity in Governance Network Theory*. *Complexity, Governance & Networks*, 61–70.
- Koliba, C. (2013). *Governance Network Performance: A Complex Adaptive Systems Approach*. *Network theory in the public sector*.

- R. Rossilawati, R. Hanani, Kismartini. (2024). *Network Governance dalam Peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri*. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Murni, R. (2016). *Peran Jejaring Kerja dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi*. *Sosio Konsepsia*, 5 (2).
- D. Assyakurrohim, D. Ikham, R. Sirodj, M. Afgani. (2023). *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3 (1).
- SIGAKEMENPPPA. 2024. Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2023. Diakses pada 21 Juli 2024 dari <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?sort=terbaru&cari=kekerasan>
- SIGAMAKASSAR. 2023. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DPPPA. Diakses pada 21 Juli 2024 dari https://siga.dp3amakassar.com/page-data-kekerasan_terhadap_perempuan.html
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) (2021). *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) 2022-2026*. Jakarta: Kemen PPPA.